



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 392

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 43 TAHUN 2024**

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.02.00/2024 tanggal 24 Desember 2024 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- b. bahwa telah terbit surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.02.00/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang mengamanatkan agar menyusun Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada lampiran Surat Menteri PANRB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
 7. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
 8. Peraturan Bupati Nias Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

9. Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
10. Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Nias

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan

10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitas dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Persediaan Pegawai adalah jumlah pegawai negeri sipil yang dimiliki saat ini.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam Perangkat Daerah.
14. Jabatan ASN terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
 - b. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, Jabatan Administrasi terdiri atas:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP JABATAN

Pasal 2

Jabatan ASN terdiri dari :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- b. Jabatan Administrasi terdiri atas :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional

BAB III
KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelas Jabatan Pelaksana dan Fungsional tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal dilakukan penyesuaian jabatan dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, penetapan kelas jabatan fungsional yang diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (2) Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, Kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas jabatan Fungsional tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 Nomor 278 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 392 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 43 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024
 TENTANG : KELAS JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA,
 ADMINISTRATOR DAN
 PENGAWAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 NIAS

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	SEKRETARIAT DAERAH	
1	Sekretaris Daerah	15
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14
4	Asisten Administrasi Umum	14
5	Kepala Bagian Pemerintahan	12
6	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	9
7	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	9
8	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9
10	Kepala Bagian Hukum	12
11	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	9
12	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9
13	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	9
14	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12
15	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	9
16	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam	9
17	Kepala Sub Bagian Perekonomian	9
18	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12
19	Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	9
20	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Layanan Secara Elektronik	9
21	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	9
22	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12
23	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program	9
24	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
25	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12
26	Kepala Sub Bagian Protokol	9
27	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	9
28	Kepala Bagian Organisasi	12
29	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9
30	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9
31	Kepala Bagian Umum	12

1	2	3
II	SEKRETARIAT DPRD	
32	Sekretaris DPRD	14
33	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11
34	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
35	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9
36	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11
37	Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi	9
38	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	9
39	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11
40	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran	9
41	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan	9
III	INSPEKTORAT	
42	Inspektur Daerah	14
43	Sekretaris	12
44	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
45	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
46	Inspektorat Pembantu Bidang Wilayah I	11
47	Inspektorat Pembantu Bidang Wilayah II	11
48	Inspektorat Pembantu Bidang Wilayah III	11
49	Inspektorat Pembantu Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigatif	11
IV	DINAS PENDIDIKAN	
50	Kepala Dinas Pendidikan	14
51	Sekretaris Dinas Pendidikan	12
52	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
53	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
54	Kepala Bidang Pembinaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	11
55	Kepala Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik	9
56	Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	9
57	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11
58	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar	9
59	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	9
60	Kepala Bidang Kebudayaan	11
61	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan Cagar Budaya dan Permuseuman	9
62	Kepala Seksi Sejarah Tradisi dan Kesenian	9
V	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NIAS	
63	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14
64	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12
65	Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	9
66	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
67	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11

1	2	3
68	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	9
69	Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan	9
70	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11
71	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9
72	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9
73	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11
74	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	9
75	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11
76	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	9
77	Kepala Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9
78	Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	9
	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	
79	Direktur UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias	12
80	Kepala Bagian TU UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias	11
81	Kepala Sub Bagian Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Aset	9
82	Kepala Sub Bagian Akreditasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kemitraan	9
83	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	9
84	Kepala Bidang Pelayanan	11
85	Kepala Seksi Keperawatan	9
86	Kepala Seksi Medis dan Penunjang Medis	9
87	Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan	11
88	Kepala Seksi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	9
89	Kepala Seksi Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Akuntansi	9
90	Kepala Bidang Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	11
91	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	9
92	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	9
VI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
93	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14
94	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12
95	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
96	Kepala Bidang Bina Marga	11
97	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi	9
98	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9
99	Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	9
100	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11
101	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air	9
102	Kepala Seksi Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	9
103	Kepala Bidang Cipta Karya	11
104	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Keciptakarya	9
105	Kepala Seksi Infrastruktur dan Penataan Bangunan	9

1	2	3
106	Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	9
107	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi	11
108	Kepala Seksi Penataan Ruang	9
109	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	9
110	Kepala Seksi Pertanahan	9
111	Kepala UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Konstruksi	9
112	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11
VII	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP	
113	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup	14
114	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup	12
115	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
116	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
117	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	11
118	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman	9
119	Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	9
120	Kepala Bidang Perhubungan	11
121	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	9
122	Kepala Seksi Prasarana dan Keselamatan	9
123	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	11
124	Kepala Seksi Pengelolaan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	9
125	Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan dan Persampahan	9
VIII	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
126	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14
127	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12
128	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
129	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada	11
130	Kepala Seksi Data, Pengawasan dan Pembinaan	9
131	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9
132	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11
133	Kepala Seksi Operasi, Pengendalian dan Penindakan	9
134	Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional	9
135	Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat	11
136	Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat, Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	9
IX	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
137	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	14
138	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	12
139	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
140	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9

1	2	3
141	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial	11
142	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	9
143	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	9
144	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11
145	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	9
146	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	9
147	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	11
148	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	9
149	Kepala Seksi Bina Administrasi Aparatur Desa dan Penguatan Kelembagaan	9
150	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	11
151	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	9
152	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11
153	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	9
154	Kepala Seksi Perlindungan Anak	9
X	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN SERTA KETENAGAKERJAAN	
155	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan	14
156	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan	12
157	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
158	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11
159	Kepala Seksi Koperasi	9
160	Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah	9
161	Kepala Bidang Perdagangan	11
162	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan Perdagangan	9
163	Kepala Seksi Standarisasi Kemetrolgian, Kemitraan dan Kerjasama Perdagangan	9
164	Kepala Bidang Tenaga Kerja	11
165	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja	9
166	Kepala Seksi Kerjasama dan Prdouktivitas Tenaga Kerja	9
XI	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
167	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	14
168	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12
169	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
170	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
171	Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan	11
172	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	9
173	Kepala Bidang Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	11
174	Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran	9
175	Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan	9
176	Kepala Bidang Peternakan	11
177	Kepala Seksi Perbibitan , Kesmavet, Produksi dan Pemasaran	9
178	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	11

1	2	3
179	Kepala Seksi Lahan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alsintan	9
180	Kepala Bidang Perikanan	11
181	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	9
182	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	9
183	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan	9
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN	
184	Kepala UPTD	9
185	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8
XII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
186	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
187	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12
188	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
189	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
190	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11
191	Kepala Seksi Identitas penduduk	9
192	Kepala Seksi Pendataan dan Pindah Datang Penduduk	9
193	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11
194	Kepala Seksi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian	9
195	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	9
196	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	11
197	Kepala Seksi Pengolahan, Penyajian Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	9
198	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	9
XIII	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
199	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14
200	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12
201	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
202	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
203	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika	11
204	Kepala Seksi Pengelolaan Data, Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur	9
205	Kepala Seksi Kerjasama, Peliputan, Publikasi dan Pengelolaan Media Center	9
206	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11
207	Kepala Seksi Statistik	9
208	Kepala Seksi Persandian	9
XIV	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
209	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14
210	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12
211	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
212	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
213	Kepala Bidang Penanaman Modal	11
214	Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	9

1	2	3
215	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	11
216	Kepala Seksi Pelayanan Penanganan Pengaduan, Advokasi Perizinan dan Non Perizinan	9
XV	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
217	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14
218	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12
219	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
220	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
221	Kepala Bidang Pariwisata	11
222	Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata	9
223	Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Pariwisata	9
224	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	11
225	Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur	9
226	Kepala Seksi Akses Permodalan, Pemasaran dan Fasilitasi	9
227	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	11
228	Kepala Seksi Kepemudaan	9
229	Kepala Seksi Keolahragaan	9
XVI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
230	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	14
231	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	12
232	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
233	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan	9
234	Kepala Bidang Perpustakaan	11
235	Kepala Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	9
236	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran Membaca	9
237	Kepala Bidang Penyelenggaraan Karsipan	11
238	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	8
239	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip	9
XVII	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
240	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14
241	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12
242	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
243	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
244	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	11
245	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9
246	Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA	9
247	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11
248	Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	9
249	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	9
250	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11
251	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	9
252	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia	9
253	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	11
254	Kepala Sub Bidang Data, Informasi Perencanaan dan Pendanaan	9
255	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	9

1	2	3
XVIII	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
256	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14
257	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12
258	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
259	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	11
260	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	9
261	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	9
262	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	11
263	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	9
264	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji	9
265	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	11
266	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban	9
267	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan	9
268	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	11
269	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	9
270	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	8
271	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	11
272	Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB	9
273	Kepala Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	9
XIX	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
274	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	14
275	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	12
276	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
277	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
278	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan, Mutasi dan Promosi	11
279	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	9
280	Kepala Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi	9
281	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	11
282	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN, Disiplin dan Pemberhentian	9
283	Kepala Sub Bidang Pengadaan, Data dan Informasi	9
284	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	11
285	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional, Penjurusan dan Sertifikasi	9
286	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	9
XX	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
287	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14
288	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
289	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
290	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11
291	Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Sosialisasi	9
292	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11
293	Kepala Seksi Penanganan Pengungsi	9
294	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11
295	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perbaikan	9
296	Kepala Seksi Rekonstruksi	9

1	2	3
XXI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
297	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
298	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12
299	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	9
300	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9
301	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	11
302	Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	9
303	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	9
304	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	11
305	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	9
306	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	9
XXII	KECAMATAN BAWOLATO	
307	Camat	12
308	Sekretaris Kecamatan	11
309	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
310	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
311	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
312	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
313	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXIII	KECAMATAN IDANOGAWO	
314	Camat	12
315	Sekretaris Kecamatan	11
316	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
317	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
318	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
319	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
320	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXIV	KECAMATAN ULUGAWO	
321	Camat	12
322	Sekretaris Kecamatan	11
323	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
324	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
325	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
326	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
327	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXV	KECAMATAN SOGAEADU	
328	Camat	12
329	Sekretaris Kecamatan	11
330	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
331	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
332	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
333	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
334	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9

1	2	3
XXVI	KECAMATAN SOMOLO-MOLO	
335	Camat	12
336	Sekretaris Kecamatan	11
337	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
338	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
339	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
340	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
341	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXVII	KECAMATAN GIDO	
342	Camat	12
343	Sekretaris Kecamatan	11
344	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
345	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
346	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
347	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
348	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXVIII	KECAMATAN MA'U	
349	Camat	12
350	Sekretaris Kecamatan	11
351	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
352	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
353	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
354	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
355	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXIX	KECAMATAN HILISERANGKAI	
356	Camat	12
357	Sekretaris Kecamatan	11
358	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
359	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
360	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8
361	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
362	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXX	KECAMATAN BOTOMUZOI	
363	Camat	12
364	Sekretaris Kecamatan	11
365	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
366	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8
367	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
368	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
369	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
XXXI	KECAMATAN HILIDUHO	
370	Camat	12
371	Sekretaris Kecamatan	11
372	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	8
373	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	8

1	2	3
374	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9
375	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
376	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 43 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024
 TENTANG : KELAS JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA,
 ADMINISTRATOR DAN
 PENGAWAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 NIAS

KELAS JABATAN STAF AHLI BUPATI NIAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
I	STAF AHLI BUPATI NIAS	
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	13
2	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	13
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13
II	SEKRETARIAT DAERAH	
1	Pengadministrasi Perkantoran	5
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Pengolah Data dan Informasi	6
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7
5	Penelaah Teknis Kebijakan	7
6	Pengolah Data dan Informasi	6
7	Penata Kelola Pemerintahan	7
8	Penelaah Teknis Kebijakan	7
9	Penata Kelola Pemerintahan	7
10	Pengadministrasi Perkantoran	5
11	Penelaah Teknis Kebijakan	7
12	Penelaah Teknis Kebijakan	7
13	Pengolah Data dan Informasi	6
14	Penelaah Teknis Kebijakan	7
15	Penelaah Teknis Kebijakan	7
16	Penelaah Teknis Kebijakan	7
17	Penelaah Teknis Kebijakan	7
18	Pengadministrasi Perkantoran	5
19	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
20	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
21	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
22	Pengolah Data dan Informasi	6
23	Penelaah Teknis Kebijakan	7
24	Penelaah Teknis Kebijakan	7
25	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
26	Dokumentalis Hukum	6
27	Pengadministrasi Perkantoran	5
28	Penelaah Teknis Kebijakan	7
29	Penelaah Teknis Kebijakan	7
30	Penelaah Teknis Kebijakan	7

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
31	Penelaah Teknis Kebijakan	7
32	Penelaah Teknis Kebijakan	7
33	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
34	Pengadministrasi Perkantoran	5
35	Penelaah Teknis Kebijakan	7
36	Penelaah Teknis Kebijakan	7
37	Pengawas Industri	7
38	Pengolah Data dan Informasi	6
39	Pengadministrasi Perkantoran	5
40	Penelaah Teknis Kebijakan	7
41	Pengolah Data dan Informasi	6
42	Pengadministrasi Perkantoran	5
43	Penelaah Teknis Kebijakan	7
44	Pengolah Data dan Informasi	6
45	Penelaah Teknis Kebijakan	7
46	Pengolah Data dan Informasi	6
47	Penelaah Teknis Kebijakan	7
48	Pengelola Layanan Pengadaan	6
49	Pengadministrasi Perkantoran	5
50	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
51	Pengelola Layanan Pengadaan	6
52	Pengadministrasi Perkantoran	5
53	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
54	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
55	Pengolah Data dan Informasi	6
56	Pengelola Keprotokolan	6
57	Penata Keprotokolan	7
58	Pengelola Layanan Operasional	6
59	Pengelola Keprotokolan	6
60	Pengadministrasi Perkantoran	5
61	Penelaah Teknis Kebijakan	7
62	Pengolah Data dan Informasi	6
63	Operator Layanan Operasional	5
64	Penelaah Teknis Kebijakan	7
65	Penelaah Teknis Kebijakan	7
66	Pengolah Data dan Informasi	6
67	Pengadministrasi Perkantoran	5
68	Penelaah Teknis Kebijakan	7
69	Penelaah Teknis Kebijakan	7
70	Pengadministrasi Perkantoran	5
71	Penelaah Teknis Kebijakan	7
72	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
73	Pengadministrasi Perkantoran	5
74	Penelaah Teknis Kebijakan	7
75	Pengolah Data dan Informasi	6
76	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
77	Pengolah Data dan Informasi	6
78	Pengadministrasi Perkantoran	5
79	Pengadministrasi Perkantoran	5
80	Pengadministrasi Perkantoran	5
81	Penelaah Teknis Kebijakan	7
82	Pengelola Layanan Operasional	6
83	Operator Layanan Operasional	5
84	Operator Layanan Operasional	5
85	Pengadministrasi Perkantoran	5
86	Pengolah Data dan Informasi	6
87	Penelaah Teknis Kebijakan	7
88	Penelaah Teknis Kebijakan	7
89	Pengadministrasi Perkantoran	5
90	Pengolah Data dan Informasi	6
III	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS	
91	Penelaah Teknis Kebijakan	7
92	Pengadministrasi Perkantoran	5
93	Pengadministrasi Perkantoran	5
94	Pengolah Data dan Informasi	6
95	Penelaah Teknis Kebijakan	7
96	Penelaah Teknis Kebijakan	7
97	Penelaah Teknis Kebijakan	7
98	Penelaah Teknis Kebijakan	7
99	Pengadministrasi Perkantoran	5
100	Pengadministrasi Perkantoran	5
101	Penelaah Teknis Kebijakan	7
102	Penelaah Teknis Kebijakan	7
103	Dokumentalis Hukum	6
104	Pengadministrasi Perkantoran	5
105	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
106	Penelaah Teknis Kebijakan	7
107	Dokumentalis Hukum	6
108	Penelaah Teknis Kebijakan	7
109	Penelaah Teknis Kebijakan	7
110	Pengolah Data dan Informasi	6
111	Pengadministrasi Perkantoran	5
112	Penelaah Teknis Kebijakan	7
113	Penelaah Teknis Kebijakan	7
114	Penelaah Teknis Kebijakan	7
115	Pengolah Data dan Informasi	6
IV	INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS	
116	Penelaah Teknis Kebijakan	7
117	Penelaah Teknis Kebijakan	7
118	Penelaah Teknis Kebijakan	7
119	Pengadministrasi Perkantoran	5
120	Pengadministrasi Perkantoran	5

1	2	3
121	Penelaah Teknis Kebijakan	7
122	Penelaah Teknis Kebijakan	7
123	Penelaah Teknis Kebijakan	7
V	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS	
124	Penelaah Teknis Kebijakan	7
125	Penelaah Teknis Kebijakan	7
126	Penelaah Teknis Kebijakan	7
127	Penelaah Teknis Kebijakan	7
128	Pengolah Data dan Informasi	6
129	Pengadministrasi Perkantoran	5
130	Pengadministrasi Perkantoran	5
131	Pengadministrasi Perkantoran	5
132	Operator Layanan Operasional	5
133	Penelaah Teknis Kebijakan	7
134	Pengolah Data dan Informasi	6
135	Penelaah Teknis Kebijakan	7
136	Penelaah Teknis Kebijakan	7
137	Penelaah Teknis Kebijakan	7
138	Penelaah Teknis Kebijakan	7
139	Penelaah Teknis Kebijakan	7
140	Pengadministrasi Perkantoran	5
141	Penelaah Teknis Kebijakan	7
142	Pengadministrasi Perkantoran	5
143	Penelaah Teknis Kebijakan	7
144	Penelaah Teknis Kebijakan	7
145	Pengadministrasi Perkantoran	5
146	Penelaah Teknis Kebijakan	7
147	Pengolah Data dan Informasi	6
148	Penelaah Teknis Kebijakan	7
149	Pengelola Layanan Operasional	6
150	Penelaah Teknis Kebijakan	7
151	Pengadministrasi Perkantoran	5
152	Operator Layanan Operasional	5
153	Penelaah Teknis Kebijakan	7
154	Penelaah Teknis Kebijakan	7
VI	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NIAS	
155	Penelaah Teknis Kebijakan	7
156	Penelaah Teknis Kebijakan	7
157	Penelaah Teknis Kebijakan	7
158	Penelaah Teknis Kebijakan	7
159	Pengolah Data dan Informasi	6
160	Pengadministrasi Perkantoran	5
161	Operator Layanan Operasional	5
162	Penelaah Teknis Kebijakan	7
163	Penelaah Teknis Kebijakan	7

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
164	Pengolah Data dan Informasi	6
165	Penelaah Teknis Kebijakan	7
166	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
167	Pengelola Layanan Kesehatan	6
168	Pengelola Layanan Kesehatan	6
169	Pengolah Data dan Informasi	6
170	Penelaah Teknis Kebijakan	7
171	Pengelola Layanan Kesehatan	6
172	Pengelola Layanan Kesehatan	6
173	Penelaah Teknis Kebijakan	7
174	Pengelola Layanan Kesehatan	6
175	Pengelola Layanan Kesehatan	6
176	Penelaah Teknis Kebijakan	7
177	Pengelola Layanan Kesehatan	6
178	Pengelola Layanan Kesehatan	6
179	Pengelola Layanan Kesehatan	6
180	Pengadministrasi Perkantoran	5
181	Pengelola Layanan Kesehatan	6
182	Pengelola Layanan Kesehatan	6
183	Penata Kelola Obat dan Makanan	7
184	Penelaah Teknis Kebijakan	7
185	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
186	Pengolah Data dan Informasi	6
187	Pengelola Layanan Kesehatan	6
188	Pengelola Layanan Kesehatan	6
189	Penelaah Teknis Kebijakan	7
190	Pengolah Data dan Informasi	6
191	Pengolah Data dan Informasi	6
192	Penelaah Teknis Kebijakan	7
193	Penelaah Teknis Kebijakan	7
194	Pengolah Data dan Informasi	6
195	Penelaah Teknis Kebijakan	7
196	Pengolah Data dan Informasi	6
197	Pengolah Data dan Informasi	6
198	Penelaah Teknis Kebijakan	7
199	Pengolah Data dan Informasi	6
200	Pengadministrasi Perkantoran	5
201	Penelaah Teknis Kebijakan	7
202	Penelaah Teknis Kebijakan	7
203	Penelaah Teknis Kebijakan	7
204	Penelaah Teknis Kebijakan	7
205	Pengolah Data dan Informasi	6
206	Pengolah Data dan Informasi	6
207	Pengelola Layanan Operasional	6
208	Pengadministrasi Perkantoran	5
209	Penelaah Teknis Kebijakan	7
210	Penelaah Teknis Kebijakan	7

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
211	Penelaah Teknis Kebijakan	7
212	Pengolah Data dan Informasi	6
213	Pengolah Data dan Informasi	6
214	Pengolah Data dan Informasi	6
215	Penelaah Teknis Kebijakan	7
216	Penelaah Teknis Kebijakan	7
217	Pengolah Data dan Informasi	6
218	Pengadministrasi Perkantoran	5
219	Pengadministrasi Perkantoran	5
220	Penelaah Teknis Kebijakan	7
221	Pengolah Data dan Informasi	6
222	Pengelola Layanan Kesehatan	6
223	Pengelola Layanan Kesehatan	6
224	Penelaah Teknis Kebijakan	7
225	Penelaah Teknis Kebijakan	7
226	Pengelola Layanan Operasional	6
227	Pengelola Layanan Kesehatan	6
228	Operator Layanan Kesehatan	5
229	Operator Layanan Operasional	5
230	Operator Layanan Operasional	5
231	Operator Layanan Operasional	5
232	Pengelola Layanan Kesehatan	6
233	Pengelola Layanan Kesehatan	6
234	Pengadministrasi Perkantoran	5
235	Penelaah Teknis Kebijakan	7
236	Penelaah Teknis Kebijakan	7
237	Pengolah Data dan Informasi	6
238	Penelaah Teknis Kebijakan	7
239	Penelaah Teknis Kebijakan	7
240	Penelaah Teknis Kebijakan	7
241	Pengolah Data dan Informasi	6
242	Pengolah Data dan Informasi	6
243	Pengolah Data dan Informasi	6
244	Penelaah Teknis Kebijakan	7
245	Penelaah Teknis Kebijakan	7
246	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
247	Penata Layanan Operasional	7
248	Pengelola Layanan Operasional	6
249	Pengadministrasi Perkantoran	5
250	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
251	Pengadministrasi Perkantoran	5
252	Penelaah Teknis Kebijakan	7
253	Operator Layanan Operasional	5
254	Operator Layanan Operasional	5
255	Operator Layanan Operasional	5
256	Pengelola Umum Operasional	1

1	2	3
VII	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS	
257	Penelaah Teknis Kebijakan	7
258	Penelaah Teknis Kebijakan	7
259	Penelaah Teknis Kebijakan	7
260	Penelaah Teknis Kebijakan	7
261	Pengolah Data dan Informasi	6
262	Pengadministrasi Perkantoran	5
263	Penelaah Teknis Kebijakan	7
264	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
265	Pengolah Data dan Informasi	6
266	Penelaah Teknis Kebijakan	7
267	Operator Layanan Operasional	5
268	Penelaah Teknis Kebijakan	7
269	Pengelola Layanan Operasional	6
270	Penelaah Teknis Kebijakan	7
271	Penelaah Teknis Kebijakan	7
272	Pengelola Layanan Operasional	6
273	Pengelola Layanan Operasional	6
274	Penelaah Teknis Kebijakan	7
275	Operator Layanan Operasional	5
276	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
277	Penelaah Teknis Kebijakan	7
278	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7
279	Operator Layanan Operasional	5
280	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7
281	Pengelola Layanan Operasional	6
282	Operator Layanan Operasional	5
283	Pengolah Data dan Informasi	6
284	Pengadministrasi Perkantoran	5
285	Penelaah Teknis Kebijakan	7
286	Operator Layanan Operasional	5
287	Pengawas Jaringan Utilitas	7
288	Penata Layanan Operasional	7
289	Pengelola Layanan Operasional	6
290	Operator Layanan Operasional	5
291	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
292	Penata Layanan Operasional	7
293	Operator Layanan Operasional	5
294	Penelaah Teknis Kebijakan	7
295	Penelaah Teknis Kebijakan	7
296	Penelaah Teknis Kebijakan	7
297	Pengolah Data dan Informasi	6
298	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6
299	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
300	Pengelola Layanan Operasional	6

1	2	3
301	Penelaah Teknis Kebijakan	7
302	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
303	Penelaah Teknis Kebijakan	7
304	Penelaah Teknis Kebijakan	7
305	Penelaah Teknis Kebijakan	7
306	Pengolah Data dan Informasi	6
307	Penelaah Teknis Kebijakan	7
308	Penelaah Teknis Kebijakan	7
309	Penelaah Teknis Kebijakan	7
310	Pengadministrasi Perkantoran	5
311	Penata Layanan Operasional	7
312	Operator Layanan Operasional	5
313	Operator Alat Berat	5
314	Operator Layanan Operasional	5
315	Penata Layanan Operasional	7
316	Teknisi Laboratorium	7
317	Pengelola Layanan Operasional	6
318	Operator Layanan Operasional	5
319	Pengelola Umum Operasional	1
VIII	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS	
320	Penelaah Teknis Kebijakan	7
321	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
322	Penelaah Teknis Kebijakan	7
323	Pengadministrasi Perkantoran	5
324	Pengadministrasi Perkantoran	5
325	Pengolah Data dan Informasi	6
326	Penelaah Teknis Kebijakan	7
327	Pengolah Data dan Informasi	6
328	Pengadministrasi Perkantoran	5
329	Penelaah Teknis Kebijakan	7
330	Penata Layanan Operasional	7
331	Pengelola Layanan Operasional	6
332	Operator Layanan Operasional	5
333	Penata Layanan Operasional	7
334	Pengelola Layanan Operasional	6
335	Operator Layanan Operasional	5
336	Penelaah Teknis Kebijakan	7
337	Penelaah Teknis Kebijakan	7
338	Pengelola Layanan Operasional	6
339	Petugas Transportasi Darat	6
340	Pengadministrasi Perkantoran	5
341	Penelaah Teknis Kebijakan	7
342	Pengelola Layanan Operasional	6
343	Pengelola Layanan Operasional	6
344	Pengadministrasi Perkantoran	5
345	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
346	Penelaah Teknis Kebijakan	7
347	Penelaah Teknis Kebijakan	7
348	Pengolah Data dan Informasi	6
349	Operator Layanan Operasional	5
350	Penata Layanan Operasional	7
351	Penelaah Teknis Kebijakan	7
352	Pengelola Layanan Operasional	6
353	Operator Layanan Operasional	5
354	Pengelola Umum Operasional	1
IX	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NIAS	
355	Penelaah Teknis Kebijakan	7
356	Penelaah Teknis Kebijakan	7
357	Pengolah Data dan Informasi	6
358	Pengadministrasi Perkantoran	5
359	Pengadministrasi Perkantoran	5
360	Operator Layanan Operasional	5
361	Penelaah Teknis Kebijakan	7
362	Penelaah Teknis Kebijakan	7
363	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
364	Pengadministrasi Perkantoran	5
365	Penelaah Teknis Kebijakan	7
366	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
367	Pengolah Data dan Informasi	6
368	Penelaah Teknis Kebijakan	7
369	Pengadministrasi Perkantoran	5
370	Operator Layanan Operasional	5
371	Operator Layanan Operasional	5
372	Penelaah Teknis Kebijakan	7
373	Penelaah Teknis Kebijakan	7
374	Pengadministrasi Perkantoran	5
375	Penelaah Teknis Kebijakan	7
376	Penelaah Teknis Kebijakan	7
377	Operator Layanan Operasional	5
378	Operator Layanan Operasional	5
379	Penelaah Teknis Kebijakan	7
380	Pengolah Data dan Informasi	6
X	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	
381	Penelaah Teknis Kebijakan	7
382	Penelaah Teknis Kebijakan	7
383	Pengolah Data dan Informasi	6
384	Pengadministrasi Perkantoran	5
385	Pengadministrasi Perkantoran	5
386	Pengadministrasi Perkantoran	5
387	Penelaah Teknis Kebijakan	7
388	Pengolah Data dan Informasi	6

1	2	3
389	Pengadministrasi Perkantoran	5
390	Penelaah Teknis Kebijakan	7
391	Penelaah Teknis Kebijakan	7
392	Penelaah Teknis Kebijakan	7
393	Pengolah Data dan Informasi	6
394	Pengadministrasi Perkantoran	5
395	Penelaah Teknis Kebijakan	7
396	Pengolah Data dan Informasi	6
397	Pengadministrasi Perkantoran	5
398	Penelaah Teknis Kebijakan	7
399	Penelaah Teknis Kebijakan	7
400	Pengolah Data dan Informasi	6
401	Penelaah Teknis Kebijakan	7
402	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
403	Pengolah Data dan Informasi	6
404	Penelaah Teknis Kebijakan	7
405	Penelaah Teknis Kebijakan	7
406	Penelaah Teknis Kebijakan	7
407	Pengadministrasi Perkantoran	5
408	Pengadministrasi Perkantoran	5
409	Penelaah Teknis Kebijakan	7
410	Penelaah Teknis Kebijakan	7
411	Penelaah Teknis Kebijakan	7
412	Penelaah Teknis Kebijakan	7
413	Penelaah Teknis Kebijakan	7
414	Pengadministrasi Perkantoran	5
415	Penelaah Teknis Kebijakan	7
416	Penelaah Teknis Kebijakan	7
417	Penelaah Teknis Kebijakan	7
418	Pengolah Data dan Informasi	6
419	Pengadministrasi Perkantoran	5
420	Penelaah Teknis Kebijakan	7
421	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
422	Pengolah Data dan Informasi	6
423	Pengolah Data dan Informasi	6
424	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7
425	Pengolah Data dan Informasi	6
426	Penelaah Teknis Kebijakan	7
XI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN SERTA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN NIAS	
427	Penelaah Teknis Kebijakan	7
428	Penelaah Teknis Kebijakan	7
429	Pengolah Data dan Informasi	6
430	Pengolah Data dan Informasi	6
431	Pengadministrasi Perkantoran	5
432	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
433	Pengolah Data dan Informasi	6
434	Pengadministrasi Perkantoran	5
435	Penelaah Teknis Kebijakan	7
436	Penelaah Teknis Kebijakan	7
437	Pengolah Data dan Informasi	6
438	Pengadministrasi Perkantoran	5
439	Penelaah Teknis Kebijakan	7
440	Penelaah Teknis Kebijakan	7
441	Pengolah Data dan Informasi	6
442	Pengadministrasi Perkantoran	5
443	Penelaah Teknis Kebijakan	7
444	Pengolah Data dan Informasi	6
445	Pengolah Data dan Informasi	6
446	Pengadministrasi Perkantoran	5
447	Penelaah Teknis Kebijakan	7
448	Penelaah Teknis Kebijakan	7
449	Pengolah Data dan Informasi	6
450	Penelaah Teknis Kebijakan	7
451	Penelaah Teknis Kebijakan	7
452	Penelaah Teknis Kebijakan	7
453	Pengadministrasi Perkantoran	5
454	Penelaah Teknis Kebijakan	7
455	Penelaah Teknis Kebijakan	7
456	Penelaah Teknis Kebijakan	7
457	Pengolah Data dan Informasi	6
XII	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS	
458	Penelaah Teknis Kebijakan	7
459	Pengolah Data dan Informasi	6
460	Pengadministrasi Perkantoran	5
461	Pengadministrasi Perkantoran	5
462	Pengadministrasi Perkantoran	5
463	Penelaah Teknis Kebijakan	7
464	Pengolah Data dan Informasi	6
465	Pengolah Data dan Informasi	6
466	Penelaah Teknis Kebijakan	7
467	Penelaah Teknis Kebijakan	7
468	Pengolah Data dan Informasi	6
469	Pengolah Data dan Informasi	6
470	Penelaah Teknis Kebijakan	7
471	Penelaah Teknis Kebijakan	7
472	Pengolah Data dan Informasi	6
473	Pengolah Data dan Informasi	6
474	Pengelola Layanan Operasional	6
475	Pengelola Layanan Operasional	6
476	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
477	Penelaah Teknis Kebijakan	7
478	Penelaah Teknis Kebijakan	7
479	Pengelola Layanan Operasional	6
480	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	5
481	Operator Layanan Operasional	5
482	Penelaah Teknis Kebijakan	7
483	Penelaah Teknis Kebijakan	7
484	Penelaah Teknis Kebijakan	7
485	Penelaah Teknis Kebijakan	7
486	Pengelola Layanan Operasional	6
487	Operator Layanan Operasional	5
488	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
489	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
490	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
491	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
492	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	6
493	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	6
494	Pengolah Data dan Informasi	6
495	Penelaah Teknis Kebijakan	7
496	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
497	Penelaah Teknis Kebijakan	7
498	Penelaah Teknis Kebijakan	7
499	Pengolah Data dan Informasi	6
500	Pengelola Layanan Operasional	6
501	Pengolah Data dan Informasi	6
502	Pengadministrasi Perkantoran	5
XIII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS	
503	Penelaah Teknis Kebijakan	7
504	Penelaah Teknis Kebijakan	7
505	Penelaah Teknis Kebijakan	7
506	Pengolah Data dan Informasi	6
507	Penelaah Teknis Kebijakan	7
508	Penelaah Teknis Kebijakan	7
509	Pengolah Data dan Informasi	6
510	Penelaah Teknis Kebijakan	7
511	Penelaah Teknis Kebijakan	7
512	Penelaah Teknis Kebijakan	7
513	Pengolah Data dan Informasi	6
514	Penelaah Teknis Kebijakan	7
515	Penelaah Teknis Kebijakan	7
516	Penelaah Teknis Kebijakan	7
517	Pengolah Data dan Informasi	6
518	Penelaah Teknis Kebijakan	7
519	Penelaah Teknis Kebijakan	7
520	Pengolah Data dan Informasi	6
521	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
522	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
523	Pengolah Data dan Informasi	6
524	Penelaah Teknis Kebijakan	7
525	Penelaah Teknis Kebijakan	7
526	Pengolah Data dan Informasi	6
XIV	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS	
527	Penelaah Teknis Kebijakan	7
528	Penelaah Teknis Kebijakan	7
529	Pengolah Data dan Informasi	6
530	Pengadministrasi Perkantoran	5
531	Penelaah Teknis Kebijakan	7
532	Pengolah Data dan Informasi	6
533	Pengadministrasi Perkantoran	5
534	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
535	Pengolah Data dan Informasi	6
536	Pengolah Data dan Informasi	6
537	Penelaah Teknis Kebijakan	7
538	Penelaah Teknis Kebijakan	7
539	Jurnalis	6
540	Pengolah Data dan Informasi	6
541	Pengadministrasi Perkantoran	5
542	Penelaah Teknis Kebijakan	7
543	Penelaah Teknis Kebijakan	7
544	Pengolah Data dan Informasi	6
545	Pengolah Data dan Informasi	6
546	Penelaah Teknis Kebijakan	7
547	Penelaah Teknis Kebijakan	7
548	Pengolah Data dan Informasi	6
549	Penelaah Teknis Kebijakan	7
550	Pengelola Layanan Operasional	6
551	Pengelola Layanan Operasional	6
XV	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS	
552	Penelaah Teknis Kebijakan	7
553	Penelaah Teknis Kebijakan	7
554	Pengadministrasi Perkantoran	5
555	Penelaah Teknis Kebijakan	7
556	Pengolah Data dan Informasi	6
557	Penelaah Teknis Kebijakan	7
558	Pengolah Data dan Informasi	6
559	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
560	Penelaah Teknis Kebijakan	7
561	Pengelola Layanan Operasional	6
562	Penelaah Teknis Kebijakan	7
563	Penelaah Teknis Kebijakan	7
564	Pengolah Data dan Informasi	6

1	2	3
565	Penelaah Teknis Kebijakan	7
566	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
567	Pengadministrasi Perkantoran	5
568	Penelaah Teknis Kebijakan	7
XVI	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NIAS	
569	Penelaah Teknis Kebijakan	7
570	Penelaah Teknis Kebijakan	7
571	Penelaah Teknis Kebijakan	7
572	Pengolah Data dan Informasi	6
573	Pengolah Data dan Informasi	6
574	Pengadministrasi Perkantoran	5
575	Pengadministrasi Perkantoran	5
576	Penelaah Teknis Kebijakan	7
577	Pengolah Data dan Informasi	6
578	Pengadministrasi Perkantoran	5
579	Penelaah Teknis Kebijakan	7
580	Pengolah Data dan Informasi	6
581	Pengadministrasi Perkantoran	5
582	Penelaah Teknis Kebijakan	7
583	Pengolah Data dan Informasi	6
584	Pengolah Data dan Informasi	6
585	Penelaah Teknis Kebijakan	7
586	Penelaah Teknis Kebijakan	7
587	Pengolah Data dan Informasi	6
588	Penelaah Teknis Kebijakan	7
589	Penelaah Teknis Kebijakan	7
590	Penelaah Teknis Kebijakan	7
591	Penelaah Teknis Kebijakan	7
592	Penelaah Teknis Kebijakan	7
593	Penelaah Teknis Kebijakan	7
594	Penelaah Teknis Kebijakan	7
595	Pengelola Layanan Operasional	6
596	Penelaah Teknis Kebijakan	7
XVII	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN NIAS	
597	Penelaah Teknis Kebijakan	7
598	Penelaah Teknis Kebijakan	7
599	Penelaah Teknis Kebijakan	7
600	Pengadministrasi Perkantoran	5
601	Pengadministrasi Perkantoran	5
602	Penelaah Teknis Kebijakan	7
603	Pengolah Data dan Informasi	6
604	Pengadministrasi Perkantoran	5
605	Penelaah Teknis Kebijakan	7
606	Pengolah Data dan Informasi	6
607	Pengolah Data dan Informasi	6
608	Pengadministrasi Perkantoran	5

1	2	3
609	Penelaah Teknis Kebijakan	7
610	Penelaah Teknis Kebijakan	7
611	Penelaah Teknis Kebijakan	7
612	Pengolah Data dan Informasi	6
613	Pengolah Data dan Informasi	6
614	Pengolah Data dan Informasi	6
615	Penelaah Teknis Kebijakan	7
616	Pengolah Data dan Informasi	6
617	Dokumentalis Hukum	6
XVIII	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NIAS	
618	Penelaah Teknis Kebijakan	7
619	Pengadministrasi Perkantoran	5
620	Pengadministrasi Perkantoran	5
621	Pengadministrasi Perkantoran	5
622	Penelaah Teknis Kebijakan	7
623	Pengolah Data dan Informasi	6
624	Penelaah Teknis Kebijakan	7
625	Penelaah Teknis Kebijakan	7
626	Penelaah Teknis Kebijakan	7
627	Penelaah Teknis Kebijakan	7
628	Pengolah Data dan Informasi	6
629	Penata Kelola Pemerintahan	7
630	Pengolah Data dan Informasi	6
631	Penelaah Teknis Kebijakan	7
632	Pengolah Data dan Informasi	6
633	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
634	Penelaah Teknis Kebijakan	7
635	Penelaah Teknis Kebijakan	7
636	Penelaah Teknis Kebijakan	7
637	Pengolah Data dan Informasi	6
XIX	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NIAS	
638	Penelaah Teknis Kebijakan	7
639	Penelaah Teknis Kebijakan	7
640	Pengolah Data dan Informasi	6
641	Penelaah Teknis Kebijakan	7
642	Penelaah Teknis Kebijakan	7
643	Pengadministrasi Perkantoran	5
644	Penelaah Teknis Kebijakan	7
645	Pengolah Data dan Informasi	6
646	Penelaah Teknis Kebijakan	7
647	Penelaah Teknis Kebijakan	7
648	Penelaah Teknis Kebijakan	7
649	Pengolah Data dan Informasi	6
650	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
651	Pengolah Data dan Informasi	6
652	Penelaah Teknis Kebijakan	7
653	Penelaah Teknis Kebijakan	7
654	Pengolah Data dan Informasi	6
655	Penelaah Teknis Kebijakan	7
656	Pengolah Data dan Informasi	6
657	Pengolah Data dan Informasi	6
658	Pengadministrasi Perkantoran	5
659	Penelaah Teknis Kebijakan	7
660	Penelaah Teknis Kebijakan	7
661	Pengolah Data dan Informasi	6
662	Pengolah Data dan Informasi	6
663	Penelaah Teknis Kebijakan	7
664	Penelaah Teknis Kebijakan	7
665	Pengolah Data dan Informasi	6
666	Pengolah Data dan Informasi	6
667	Penelaah Teknis Kebijakan	7
668	Pengolah Data dan Informasi	6
669	Pengadministrasi Perkantoran	5
670	Penelaah Teknis Kebijakan	7
671	Penelaah Teknis Kebijakan	7
672	Pengolah Data dan Informasi	6
673	Operator Layanan Operasional	5
XX	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NIAS	
674	Penelaah Teknis Kebijakan	7
675	Penelaah Teknis Kebijakan	7
676	Pengolah Data dan Informasi	6
677	Pengadministrasi Perkantoran	5
678	Penelaah Teknis Kebijakan	7
679	Pengadministrasi Perkantoran	5
680	Penelaah Teknis Kebijakan	7
681	Pengolah Data dan Informasi	6
682	Penelaah Teknis Kebijakan	7
683	Penelaah Teknis Kebijakan	7
684	Penelaah Teknis Kebijakan	7
685	Pengadministrasi Perkantoran	5
686	Pengolah Data dan Informasi	6
687	Penelaah Teknis Kebijakan	7
688	Pengolah Data dan Informasi	6
689	Pengolah Data dan Informasi	6
690	Penelaah Teknis Kebijakan	7
691	Penelaah Teknis Kebijakan	7
692	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
693	Pengolah Data dan Informasi	6
694	Pengolah Data dan Informasi	6

1	2	3
695	Penelaah Teknis Kebijakan	7
696	Penelaah Teknis Kebijakan	7
697	Pengadministrasi Perkantoran	5
698	Penelaah Teknis Kebijakan	7
699	Penelaah Teknis Kebijakan	7
700	Pengadministrasi Perkantoran	5
701	Penelaah Teknis Kebijakan	7
702	Fasilitator Pemerintahan	7
XXI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NIAS	
703	Penelaah Teknis Kebijakan	7
704	Penelaah Teknis Kebijakan	7
705	Pengolah Data dan Informasi	6
706	Pengadministrasi Perkantoran	5
707	Penelaah Teknis Kebijakan	7
708	Pengolah Data dan Informasi	6
709	Pengadministrasi Perkantoran	5
710	Penelaah Teknis Kebijakan	7
711	Pengolah Data dan Informasi	6
712	Penelaah Teknis Kebijakan	7
713	Pengelola Layanan Operasional	6
714	Penelaah Teknis Kebijakan	7
715	Pengolah Data dan Informasi	6
716	Pengolah Data dan Informasi	6
717	Penelaah Teknis Kebijakan	7
718	Pengolah Data dan Informasi	6
719	Pengolah Data dan Informasi	6
720	Penelaah Teknis Kebijakan	7
721	Penelaah Teknis Kebijakan	7
722	Pengolah Data dan Informasi	6
723	Penelaah Teknis Kebijakan	7
724	Pengolah Data dan Informasi	6
XXII	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NIAS	
725	Penelaah Teknis Kebijakan	7
726	Penelaah Teknis Kebijakan	7
727	Pengolah Data dan Informasi	6
728	Pengadministrasi Perkantoran	5
729	Pengadministrasi Perkantoran	5
730	Penelaah Teknis Kebijakan	7
731	Pengolah Data dan Informasi	6
732	Pengadministrasi Perkantoran	5
733	Penelaah Teknis Kebijakan	7
734	Penelaah Teknis Kebijakan	7
735	Penelaah Teknis Kebijakan	7
736	Penelaah Teknis Kebijakan	7
737	Penelaah Teknis Kebijakan	7
738	Penelaah Teknis Kebijakan	7

1	2	3
739	Pengolah Data dan Informasi	6
740	Pengadministrasi Perkantoran	5
741	Penelaah Teknis Kebijakan	7
742	Penelaah Teknis Kebijakan	7
743	Pengolah Data dan Informasi	6
744	Penelaah Teknis Kebijakan	7
745	Penelaah Teknis Kebijakan	7
746	Pengolah Data dan Informasi	6
XXIII	KECAMATAN GIDO	
747	Penelaah Teknis Kebijakan	7
748	Penelaah Teknis Kebijakan	7
749	Pengolah Data dan Informasi	6
750	Pengadministrasi Perkantoran	5
751	Penelaah Teknis Kebijakan	7
752	Pengolah Data dan Informasi	6
753	Pengadministrasi Perkantoran	5
754	Penelaah Teknis Kebijakan	7
755	Pengolah Data dan Informasi	6
756	Pengadministrasi Perkantoran	5
757	Penelaah Teknis Kebijakan	7
758	Penelaah Teknis Kebijakan	7
759	Pengadministrasi Perkantoran	5
760	Pengolah Data dan Informasi	6
761	Operator Layanan Operasional	5
XXIV	KECAMATAN HILISERANGKAI	
762	Penelaah Teknis Kebijakan	7
763	Pengolah Data dan Informasi	6
764	Pengadministrasi Perkantoran	5
765	Penelaah Teknis Kebijakan	7
766	Pengolah Data dan Informasi	6
767	Pengadministrasi Perkantoran	5
768	Penelaah Teknis Kebijakan	7
769	Pengolah Data dan Informasi	6
770	Pengadministrasi Perkantoran	5
771	Penelaah Teknis Kebijakan	7
772	Pengolah Data dan Informasi	6
773	Pengolah Data dan Informasi	6
774	Pengadministrasi Perkantoran	5
775	Operator Layanan Operasional	5
776	Pengolah Data dan Informasi	6
XXV	KECAMATAN BAWOLATO	
777	Penelaah Teknis Kebijakan	7
778	Pengolah Data dan Informasi	6
779	Pengadministrasi Perkantoran	5
780	Penelaah Teknis Kebijakan	7
781	Pengolah Data dan Informasi	6

1	2	3
782	Pengadministrasi Perkantoran	5
783	Penelaah Teknis Kebijakan	7
784	Pengolah Data dan Informasi	6
785	Pengadministrasi Perkantoran	5
786	Penelaah Teknis Kebijakan	7
787	Pengolah Data dan Informasi	6
788	Pengolah Data dan Informasi	6
789	Pengadministrasi Perkantoran	5
790	Pengadministrasi Perkantoran	5
791	Operator Layanan Operasional	5
792	Pengelola Layanan Operasional	6
793	Operator Layanan Operasional	5
XXVI	KECAMATAN ULUGAWO	
794	Penelaah Teknis Kebijakan	7
795	Pengolah Data dan Informasi	6
796	Pengadministrasi Perkantoran	5
797	Penelaah Teknis Kebijakan	7
798	Pengolah Data dan Informasi	6
799	Pengadministrasi Perkantoran	5
780	Penelaah Teknis Kebijakan	7
801	Pengolah Data dan Informasi	6
802	Pengadministrasi Perkantoran	5
803	Penelaah Teknis Kebijakan	7
804	Pengolah Data dan Informasi	6
805	Pengolah Data dan Informasi	6
806	Pengadministrasi Perkantoran	5
807	Operator Layanan Operasional	5
808	Pengolah Data dan Informasi	6
XXVII	KECAMATAN HILIDUHO	
809	Penelaah Teknis Kebijakan	7
810	Penelaah Teknis Kebijakan	7
811	Pengolah Data dan Informasi	6
812	Pengadministrasi Perkantoran	5
813	Penelaah Teknis Kebijakan	7
814	Pengolah Data dan Informasi	6
815	Pengadministrasi Perkantoran	5
816	Penelaah Teknis Kebijakan	7
817	Pengolah Data dan Informasi	6
818	Pengadministrasi Perkantoran	5
819	Penelaah Teknis Kebijakan	7
820	Penelaah Teknis Kebijakan	7
821	Pengolah Data dan Informasi	6
822	Pengadministrasi Perkantoran	5
823	Pengadministrasi Perkantoran	5
824	Operator Layanan Operasional	5
825	Pengolah Data dan Informasi	6

1	2	3
XXVIII	KECAMATAN SOGAE'ADU	
826	Penelaah Teknis Kebijakan	7
827	Pengolah Data dan Informasi	6
828	Pengadministrasi Perkantoran	5
829	Penelaah Teknis Kebijakan	7
830	Pengolah Data dan Informasi	6
831	Penelaah Teknis Kebijakan	7
832	Pengolah Data dan Informasi	6
833	Pengadministrasi Perkantoran	5
834	Penelaah Teknis Kebijakan	7
835	Penelaah Teknis Kebijakan	7
836	Pengolah Data dan Informasi	6
837	Pengadministrasi Perkantoran	5
838	Operator Layanan Operasional	5
839	Pengolah Data dan Informasi	6
XXIX	KECAMATAN MA'U	
840	Penelaah Teknis Kebijakan	7
841	Pengolah Data dan Informasi	6
842	Pengadministrasi Perkantoran	5
843	Penelaah Teknis Kebijakan	7
844	Pengolah Data dan Informasi	6
845	Pengadministrasi Perkantoran	5
846	Penelaah Teknis Kebijakan	7
847	Pengolah Data dan Informasi	6
848	Pengadministrasi Perkantoran	5
849	Penelaah Teknis Kebijakan	7
850	Pengolah Data dan Informasi	6
851	Pengolah Data dan Informasi	6
852	Pengadministrasi Perkantoran	5
853	Operator Layanan Operasional	5
854	Pengolah Data dan Informasi	6
XXX	KECAMATAN SOMOLO-MOLO	
855	Penelaah Teknis Kebijakan	7
856	Pengolah Data dan Informasi	6
857	Pengadministrasi Perkantoran	5
858	Operator Layanan Operasional	5
859	Penelaah Teknis Kebijakan	7
860	Pengolah Data dan Informasi	6
861	Pengadministrasi Perkantoran	5
862	Penelaah Teknis Kebijakan	7
863	Pengolah Data dan Informasi	6
864	Penelaah Teknis Kebijakan	7
865	Penelaah Teknis Kebijakan	7
866	Pengolah Data dan Informasi	6
867	Pengadministrasi Perkantoran	5
868	Operator Layanan Operasional	5
869	Pengolah Data dan Informasi	6

1	2	3
XXXI	KECAMATAN IDANOGAWO	
870	Penelaah Teknis Kebijakan	7
871	Penelaah Teknis Kebijakan	7
872	Pengolah Data dan Informasi	6
873	Pengadministrasi Perkantoran	5
874	Penelaah Teknis Kebijakan	7
875	Pengolah Data dan Informasi	6
876	Pengadministrasi Perkantoran	5
877	Penelaah Teknis Kebijakan	7
878	Pengolah Data dan Informasi	6
879	Pengadministrasi Perkantoran	5
880	Penelaah Teknis Kebijakan	7
881	Pengolah Data dan Informasi	6
882	Pengolah Data dan Informasi	6
883	Pengadministrasi Perkantoran	5
884	Pengolah Data dan Informasi	6
885	Operator Layanan Operasional	5
886	Operator Layanan Operasional	5
XXXII	KECAMATAN BOTOMUZOI	
887	Pengolah Data dan Informasi	6
888	Pengadministrasi Perkantoran	5
889	Penelaah Teknis Kebijakan	7
890	Pengolah Data dan Informasi	6
891	Pengadministrasi Perkantoran	5
892	Penelaah Teknis Kebijakan	7
893	Pengolah Data dan Informasi	6
894	Pengadministrasi Perkantoran	5
895	Penelaah Teknis Kebijakan	7
896	Pengolah Data dan Informasi	6
897	Pengadministrasi Perkantoran	5
898	Pengadministrasi Perkantoran	5
899	Pengolah Data dan Informasi	6
900	Penelaah Teknis Kebijakan	7
901	Penelaah Teknis Kebijakan	7
902	Penelaah Teknis Kebijakan	7
903	Pengolah Data dan Informasi	6
904	Pengadministrasi Perkantoran	5
905	Penelaah Teknis Kebijakan	7
906	Pengolah Data dan Informasi	6
907	Pengadministrasi Perkantoran	5
908	Penelaah Teknis Kebijakan	7
909	Pengolah Data dan Informasi	6
910	Pengadministrasi Perkantoran	5
911	Penelaah Teknis Kebijakan	7
912	Pengolah Data dan Informasi	6
913	Pengadministrasi Perkantoran	5

1	2	3
914	Pengadministrasi Perkantoran	5
915	Pengolah Data dan Informasi	6
916	Penelaah Teknis Kebijakan	7
917	Penelaah Teknis Kebijakan	7
918	Penelaah Teknis Kebijakan	7
	JABATAN FUNGSIONAL	
	I SEKRETARIAT DAERAH	
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
2	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
3	Analisis Hukum Ahli Muda	9
4	Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
5	Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda	9
6	Perencana Ahli Muda	9
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
8	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	10
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
12	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	10
15	Perencana Ahli Muda	10
16	Perencana Ahli Pertama	8
	II SEKRETARIAT DPRD	
17	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8
18	Perencana Ahli Pertama	8
19	Analisis Hukum Pertama	8
	III INSPEKTORAT DAERAH	
20	Auditor Utama	14
21	Auditor Madya	12
22	Auditor Muda	10
23	Auditor Pertama	8
24	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	8
25	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	10
26	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	12
27	Pranata Komputer Terampil	6
	IV DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS	
28	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
29	Perencana Ahli Pertama	8
30	Penata Laksana Barang Terampil	6
	V DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
31	Administrator Kesehatan Madya	11
32	Administrator Kesehatan Muda	9
33	Administrator Kesehatan Pertama	8
34	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8
35	Epidemiolog Kesehatan Muda	9

1	2	3
VI	UPTD Instalasi Farmasi	
36	Apoteker Pertama	8
37	Asisten Apoteker Penyelia	8
38	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
39	Asisten Apoteker Terampil	6
VII	UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias	
40	Dokter Madya (Dokter Spesialis)	12
41	Dokter Muda (Dokter Spesialis)	10
42	Dokter Pertama (Dokter Spesialis)	9
43	Dokter Umum Madya	12
44	Dokter Umum Muda	10
45	Dokter Umum Pertama	9
46	Dokter Gigi Madya	12
47	Apoteker Madya	11
48	Apoteker Muda	9
49	Apoteker Pertama	8
50	Asisten Apoteker Penyelia	8
51	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7
52	Asisten Apoteker Pelaksana	6
53	Fisikawan Medis Madya	11
54	Fisikawan Medis Muda	9
55	Fisikawan Medis Pertama	8
56	Administrator Kesehatan Muda	9
57	Administrator Kesehatan Pertama	8
58	Perekam Medis Pertama	8
59	Perekam Medis Penyelia	8
60	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7
61	Perekam Medis Pelaksana	6
62	Teknisi Elektromedis Muda	9
63	Teknisi Elektromedis Pertama	8
64	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7
65	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6
66	Perawat Madya	11
67	Perawat Muda	9
68	Perawat Pertama	8
69	Perawat Penyelia	8
70	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
71	Perawat Pelaksana	6
72	Penata Anestesi Muda	9
73	Penata Anestesi Pertama	8
74	Asisten Penata Anestesi Penyelia	8
75	Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7
76	Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6
77	Refraksionis Optisien Penyelia	8
78	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7
79	Refraksionis Optisien Pelaksana	6

1	2	3
80	Bidan Muda	9
81	Bidan Pertama	8
82	Bidan Penyelia	8
83	Bidan Pelaksana Lanjutan	7
84	Bidan Pelaksana	6
85	Radiografer Pertama	8
86	Radiografer Penyelia	8
87	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7
88	Radiografer Pelaksana	6
89	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8
90	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
91	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7
92	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6
93	Fisioterapis Pertama	8
94	Fisioterapis Penyelia	8
95	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7
96	Fisioterapis Pelaksana	6
97	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	7
98	Terapis Wicara Pelaksana	6
99	Nutrisisionis Madya	11
100	Nutrisisionis Muda	9
101	Nutrisisionis Pertama	8
102	Nutrisisionis Penyelia	8
103	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7
104	Nutrisisionis Pelaksana	6
105	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8
106	Tenaga Sanitasi Lingkungan Pelaksana	6
107	Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8
108	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
109	Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Lanjutan	7
110	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
111	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8
112	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
VIII	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
113	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8
114	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
115	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8
116	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8
117	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8
118	Penata Ruang Ahli Pertama	8
119	Perencana Ahli Muda	9
IX	UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Konstruksi	
120	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	8

1	2	3
X	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP	
121	Penata Kelola Bangunan Gedung Ahli Pertama	8
122	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8
123	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8
124	Perencana Ahli Pertama	8
125	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	6
126	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	6
127	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6
XI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
128	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
129	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9
130	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	11
131	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
132	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
133	Perencana Ahli Muda	9
134	Perencana Ahli Madya	11
135	Pemadam Kebakaran Pemula	5
136	Pemadam Kebakaran Terampil	6
137	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	8
XII	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
138	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9
139	Perencana Ahli Pertama	8
140	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8
XIII	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN SERTA KETENAGAKERJAAN	
141	Penera Ahli Pertama	8
142	Pengawas Koperasi Pertama	8
143	Instruktur Pertama	8
144	Pengantar Kerja Pertama	8
145	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8
146	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8
XIV	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
147	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9
148	Perencana Ahli Pertama	8
149	Medik Veteriner Ahli Muda	9
150	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9
151	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
152	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9
153	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8
154	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9
155	Penata Laksana Barang Terampil	6
XV	UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian	
156	Penyuluh Pertanian Madya	11
157	Penyuluh Pertanian Muda	9
158	Penyuluh Pertanian Pertama	8

1	2	3
159	Penyuluh Pertanian Penyelia	8
160	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7
167	Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil	6
168	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5
169	Penyuluh Perikanan Madya	11
170	Penyuluh Perikanan Muda	9
171	Penyuluh Perikanan Pertama	8
172	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula	5
XVI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
173	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
174	Arsiparis Ahli Pertama	8
175	Administator Data Base Kependudukan Ahli Pertama	8
176	Operator SIAK Mahir	6
177	Operator SIAK Pemula	6
178	Operator SIAK Terampil	6
XVII	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
179	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
180	Sandiman Ahli Pertama	8
181	Penerjemah Pertama	8
XVIII	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
182	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
183	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8
XIX	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
184	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8
185	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	10
186	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11
187	Penerjemah Pertama	8
188	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	8
XX	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
189	Pustakawan Ahli Pertama	8
190	Arsiparis Pertama	8
191	Penerjemah Pertama	8
XXI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
192	Perencana Pertama	8
XXII	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
193	Perencana Ahli Muda	9
194	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8
195	Penata Laksana Barang Terampil	6
XXIII	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
196	Analisis SDM Aparatur Pertama	8
197	Auditor Kepegawaian Pertama	8
198	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
XXIV	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
199	Perencana Ahli Muda	9
200	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9
201	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8

1	2	3
XXV	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
202	Analisis Kebijakan Ahli Madya	11
203	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
204	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI